

SIARAN PERS

Kebijakan apa yang paling efektif untuk mendorong masa depan pekerjaan yang inklusif? Upaya apa yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan kemauan untuk belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hayat? Bagaimana meningkatkan dividen digital bagi perempuan?

Internet dan Masa Depan Pekerjaan yang Lebih Inklusif

Jakarta, 30 Maret 2022 — Perubahan di pasar tenaga kerja global dapat meningkatkan ketimpangan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, muncul urgensi untuk mempersiapkan kebijakan efektif sebagai respons untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Bonus demografi di negara berkembang dan masyarakat menua yang dihadapi negara maju menciptakan tantangan yang berbeda terkait masa depan pekerjaan. Kebijakan apa yang paling efektif untuk mendorong masa depan pekerjaan yang inklusif? Upaya apa yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan kemauan untuk belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hayat? Bagaimana meningkatkan dividen digital bagi perempuan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dibahas dalam acara “Global Summit Solutions 2022: Menjembatani Pekerjaan pada Masa Depan: Menemukan Landasan Bersama untuk Bonus Demografi di Negara Berkembang dan Masyarakat yang Menua di Negara Maju” yang diselenggarakan oleh Global Solutions Initiative dan The SMERU Research Institute (SMERU). Acara yang didukung oleh Knowledge Sector Initiative dan Tanoto Foundation ini mengusulkan beberapa solusi untuk menjembatani berbagai kepentingan dan mengurangi ketimpangan pekerjaan pada masa depan baik untuk negara berkembang maupun negara maju.

Internet sebagai hal dasar untuk mendorong terciptanya masa depan pekerjaan yang inklusif.

Untuk membuat pekerjaan pada masa depan inklusif, perlu dipastikan bahwa internet tersedia dan dapat diakses oleh semua orang. “Sudah saatnya wacana internet sebagai hak sipil/hak dasar bagi semua warga negara diangkat,” ujar Widjajanti Isdijoso (Direktur SMERU). Internet hanya dapat diakses jika paket data terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, diharapkan adanya kebijakan yang dapat memfasilitasi kerja sama antara penyedia internet untuk mengurangi biaya operasional sehingga harga lebih terjangkau. Pemerintah juga dapat merancang skema kepemilikan telepon cerdas (*smartphone*) yang terjangkau untuk mengoptimalkan infrastruktur internet yang tersedia.

Widjajanti menambahkan, “Literasi digital harus secara khusus menyoroti kelompok marginal, [yaitu] perempuan, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan [warga] lansia. Dengan demikian, kebijakan afirmatif untuk mengatasi kesenjangan digital dan meningkatkan literasi digital akan efektif untuk mendorong masa depan pekerjaan yang inklusif”.

Merancang kebijakan yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat.

Pembelajar sepanjang hayat terbuka terhadap penemuan dan pengalaman baru. Mereka adalah masyarakat atau pekerja yang memandang dunia sebagai ruang untuk belajar dan berlatih untuk berpikir secara kritis dan mendalam dalam rangka mencari pengetahuan. Untuk menumbuhkan kemauan belajar di dunia digital, sistem pendidikan perlu ditingkatkan agar siswa dapat belajar pada level penerapan dan memiliki pola pikir 'berkembang' yang dapat mendorong mereka untuk terus berinovasi.

Pemerolehan keterampilan menjadi faktor penting yang memengaruhi pekerjaan pada masa depan. Oleh karena itu, perlu disusun kebijakan yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat. "Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi di bidang pendidikan dalam menyediakan materi daring yang dapat diakses oleh tenaga kerja untuk melatih kembali dan meningkatkan keterampilan mereka sendiri secara mandiri," ujar Widjajanti. Teknologi memang mengeliminasi beberapa pekerjaan, tetapi juga sekaligus menciptakan pekerjaan baru. Oleh karena itu, upaya untuk mendukung pembelajaran keterampilan baru pada kemudian hari akan mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan.

Teknologi digital inklusif berpotensi dapat hambatan kerja yang dihadapi perempuan.

Di seluruh dunia, perempuan terus menghadapi ketidakterjangkauan (*unaffordability*), kurangnya konektivitas, dan kurangnya akses terhadap perangkat. Jika tidak ditangani dengan baik, kesenjangan gender dalam hal akses terhadap internet akan berpengaruh pada kesenjangan di pasar tenaga kerja dan inklusi keuangan. Sementara itu, teknologi informasi dan komunikasi berpotensi membuka peluang untuk memberikan layanan yang dapat menjangkau kelompok masyarakat miskin dan marginal, seperti perempuan. "Kebijakan yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender dalam akses internet dan perangkat akan memberdayakan perempuan, serta dapat mencegah dan mengurangi kesenjangan gender di banyak aspek kehidupan," ujar Widjajanti Isdijoso (Direktur SMERU).

Kedua, upaya untuk meningkatkan keterampilan digital sama pentingnya dengan meningkatkan kesiapan perempuan dalam menggunakan teknologi. Kebijakan untuk mengurangi kesenjangan dalam literasi dan keterampilan digital harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok demografis karena kecepatan setiap orang untuk masuk ke dunia teknologi digital berbeda-beda.

Ketiga, teknologi digital berpotensi untuk meminimalkan hambatan kerja yang dihadapi perempuan. Kendala norma sosial, seperti pembagian kerja perawatan tak berbayar yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, pada akhirnya dapat menunda perempuan untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi. Oleh karena itu, mengubah norma sosial terkait kerja perawatan tak berbayar dianggap perlu agar perempuan dapat memanfaatkan internet untuk mengakses pekerjaan yang lebih menguntungkan.

Terakhir, data menunjukkan bahwa kekerasan daring yang difasilitasi oleh teknologi informasi dan komunikasi terhadap perempuan dan anak perempuan terus meningkat selama pandemi COVID-19. Kejadian ini harus menjadi perhatian para pembuat kebijakan karena peningkatan kekerasan daring pada akhirnya dapat berdampak pada akses perempuan terhadap layanan daring atau pendidikan dan kesempatan kerja mereka. Pemerintah negara G20 harus bertindak untuk memperkuat penegakan hukum dalam rangka mengurangi kekerasan daring terhadap perempuan. Sebagai catatan, ada banyak negara berkembang yang belum memiliki peraturan terkait kekerasan daring terhadap perempuan dan anak perempuan.

Pergeseran jenis pekerjaan membutuhkan peningkatan keterampilan nonteknis agar sumber daya manusia dapat bekerja berdampingan dengan teknologi terkini secara efektif dan tetap relevan dengan kebutuhan pekerjaan pada masa depan. Pergeseran pekerjaan tersebut terus terjadi dan beberapa jenis pekerjaan dengan cepat menjadi usang. Oleh karena itu, pemerintah, sistem pendidikan, dan pelaku usaha dapat bermitra untuk (i) membantu pekerja mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan agar sesuai dengan perubahan terkini dan (ii) memastikan perputaran ekonomi yang sehat. Terakhir, dalam rangka pemulihan bersama dan pemulihan yang lebih kuat, pemerintah, baik di negara maju maupun negara berkembang, perlu memiliki semangat solidaritas dan kemitraan dalam mempersiapkan masa depan pekerjaan yang tidak meninggalkan siapa pun.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:

Ratri Indah Septiana
Kepala Bidang Komunikasi
The SMERU Research Institute
rseptiana@smeru.or.id

Tentang The SMERU Research Institute

SMERU adalah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik. Sejak didirikan pada 2001, SMERU telah menjadi lembaga terdepan dalam melakukan kajian di bidang kemiskinan dan ketimpangan. Informasi lebih lanjut tentang SMERU dapat dilihat di www.smeru.or.id.

Tentang Task Force 5–T20

The SMERU Research Institute adalah host Task Force 5 T20 dengan fokus pada topik ketaksetaraan, sumber daya manusia, dan kesejahteraan. Dengan Asep Suryahadi sebagai lead co-chair, bersama dengan para co-chair lainnya, SMERU akan memimpin pengembangan 17 catatan kebijakan yang akan disusun oleh penulis dari berbagai belahan dunia; merumuskan catatan kebijakan terpadu tentang ketaksetaraan, sumber daya manusia, dan kesejahteraan untuk T20 dan G20; dan menyelenggarakan acara sampingan dalam waktu dekat.